

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abubakar, Iskandar, dkk. *Pedoman Perencanaan dan Pengoprasian Fasilitas Parkir*, Jakarta, Direktorat Jenderal Angkutan Darat.
- Afandi, Wahyu. 1981. *Hakim dan Penegakan Hukum*, Bandung, Alumni.
- Hamzah, Andi. 1986. *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Andi. 1991. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.
- M.Husein, Harun. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- R.Subekti dan Tjitrosoedibyo, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Pramita.
- Salam, Faisal, 2002, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.
- Soejono, 1996, *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir*, Jakarta, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Press.
- Sugiarto, Umar Said. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tobing, David M.L. 2007. *Parkir + Perlindungan Hukum Konsumen*. Jakarta. Timpani Agung.

JURNAL:

Ilosa, A. 2016. Kualitas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Yogyakarta. *Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara*, Volume 4, Nomor 2.

Najibuddin, M. 2014. Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Di Desa Benua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Volume 4, Nomor 7.

Nugraha, G.P. 2013. Studi Tentang Peran Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Parkir Liar di Pasar Pagi Kota Samarinda. *Jurnal Administrasi Negara*, Volume 1, Nomor 4, : 1495-1510.

Prasetyo, T. 2009. Kebijakan Kriminalisasi dalam Peraturan Daerah dan Sinkronisasi dengan Hukum Pidana Kodifikasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 1, Nomor 3.

Rezapahlepi, A. 2016. Pengawasan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Terhadap Perparkiran di kota Pekanbaru. *Jurnal Universitas Riau Kampus Bina Widya*, Volume 3, Nomor 1.

Sanyoto, S. 2008. Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 8, Nomor 3.

Satuhu, R. 2013. Kendala Dinas Perhubungan Dalam Mengawasi Dan Memberi Pembinaan Bagi Pengelola Parkir Untuk Mencegah Penggunaan Klausula Eksonerasi Pada Karcis Parkir. *Jurnal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Brawijaya*, Volume 2, Nomor 1.

Utomo, A. P. 2013. Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi Parkir Di Universitas Muria Kudus. *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro dan Ilmu Komputer*, Volume 1, Nomor 1.

Widiyanti, D., & Sembiring, J. 2015. Optimalisasi Pengelolaan Dan Pelayanan Perparkiran Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Di Kota Bandung Parking Optimization And Service Management In Order To Improve Public Transport Services In Bandung. *Jurnal Penelitian Transportasi Darat*, Volume 17, Nomor 4, : 235-246.

Yuda, M.R., Sulistyorini, R., & Herianto, D. 2016. Studi Optimalisasi Fasilitas Parkir di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung. *Jurnal Rekayasa Sipil dan Desain* 3, no. 3: 468-482.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Retrubusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.